

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 9, Oktober 2025, P. 53-65
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17514503>

Paradoks Kemakmuran: Perbandingan Sistem Otoritarisme Negara Singapura dan Myanmar

The Paradox of Prosperity: A Comparative Study of the Authoritarian Regimes of Singapore and Myanmar

Bella Saidah Hoerul Nisa¹, Shezy Solevina Putri², Rahmah Nur Syabani³, Dewi Erlina⁴, Dinda Pebriani⁵, Elly Nurlia⁶

¹²³⁴⁵⁶ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: 6670230086@untirta.ac.id, 6670230078@untirta.ac.id, rahmasyabani704@gmail.com,
dewierlinaa808@gmail.com, dindafebriani761@gmail.com, ellynurlia@untirta.ac.id

Abstrak

Studi perbandingan politik menghadapi paradoks fundamental, kesamaan sistem otoriter antara dua negara tidak menjamin hasil ekonomi yang sama. Di Asia Tenggara, Singapura (menerapkan sistem otoriter, tanpa sumber daya alam tetapi makmur) dan Myanmar (menerapkan sistem otoriter, kaya akan sumber daya alam yang melimpah namun mengalami krisis ekonomi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas hasil ekonomi menggunakan teori institusi Douglass North. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil temuan menyatakan bahwa Myanmar menerapkan Hard-Authoritarianism (Extractive State) di mana Institusi Informal (patronase dan kleptokrasi militer) melumpuhkan Institusi Formal, menciptakan insentif yang destruktif. Sebaliknya, Singapura menerapkan Soft-Authoritarianism (Developmental State) di mana Institusi Informal (meritokrasi dan anti-korupsi) memperkuat Institusi Formal pro-pasar, mendorong investasi produktif. Dengan demikian faktor penentu utama di balik disparitas ekstrem dalam kemakmuran kedua negara ini bukanlah tipe rezim politiknya melainkan kualitas dan kongruensi institusi.

Keywords: *Paradoks Kemakmuran: Studi Perbandingan Rezim Otoritarian di Singapura dan Myanmar*

Abstract

Comparative political studies confront a fundamental paradox: the similarity of authoritarian systems between two countries does not guarantee identical economic outcomes. In Southeast Asia, Singapore (implementing an authoritarian system, lacking natural resources but prosperous) and Myanmar (implementing an authoritarian system, rich in natural resources but experiencing economic crisis) are two examples. This study aims to analyze the disparity in economic outcomes using Douglass North's institutional theory. This study employed a qualitative method with a case study approach, and data collection was conducted through literature review. The findings suggest that Myanmar implements a hard authoritarianism (extractive state) where informal institutions (military patronage and kleptocracy) cripple formal institutions, creating destructive incentives. Conversely, Singapore implements a soft authoritarianism (developmental state) where informal institutions (meritocracy and anti-corruption) strengthen pro-market formal institutions, encouraging productive investment. Thus, the primary determinant behind the extreme disparity in prosperity between these two countries is not the type of political regime but rather the quality and congruence of institutions.

Keywords: *Authoritarianism, Informal Institutions, Douglass North, Singapore, Myanmar*

PENDAHULUAN

Studi perbandingan politik dihadapkan oleh paradoks fundamental, kesamaan kerangka institusional atau sistem politik antara dua negara tidak menjamin hasil yang sama. Fenomena inilah yang menjadi titik penting dalam analisis komparatif kontemporer. Sistem politik yang kita kenal ada dua yakni sistem demokratis dan juga sistem otoriter (Marpaung & Siahaan, 2024; Tudor & Slater, 2021). Kedua sistem ini tentunya sangat berbeda, demokratis sangat mementingkan kehendak rakyat dan adanya kebebasan sedangkan otoriter membatasi partisipasi dan kebebasan (Anggraeni et al., 2023).

Dalam panggung politik global sistem otoritarisme sering sekali berhasil meningkatkan perekonomian, karena kecepatan pengambilan keputusannya dan juga jaminan stabilitas politik yang mempermudah negara untuk melakukan pembangunan (Pito et al., 2022). Meskipun demokrasi menyediakan mekanisme musyawarah yang memungkinkan adanya pengkoreksian dan akuntabilitas dalam jangka panjang, tapi otoritarisme dapat meraih kesuksesan ekonomi lebih cepat asalkan adanya komitmen elit penguasa untuk pembangunan nasional (Wardah et al., 2025). Namun di lanskap Asia tenggara terjadi sebuah fenomena kontradiktif bahwa kedua negara yaitu Singapura dan Myanmar menerapkan sistem otoritarisme namun keduanya memiliki tingkat kemakmuran yang sangat berbeda.

Singapura dan Myanmar merupakan dua negara yang berada di lingkungan geografis yang sama, mengalami sejarah kolonialisme yang mirip bahkan menerapkan sistem pemerintahan otoritarisme, namun keduanya berkembang tetapi menjadi entitas ekonomi politik yang sangat berbeda. Perbedaan ini bukan hanya sekedar perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, melainkan merupakan perbedaan yang fundamental dalam hal model governance, kesejahteraan rakyat, dan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah prasyarat krusial untuk menjamin kesejahteraan rakyat tetapi akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut sangat bergantung pada kerangka sistem politik serta komitmen elit penguasa (Addainuri et al., 2023; Bachtiar, 2022).

Singapura adalah sebuah negara dengan luas 728,6 km persegi, lokasinya sangat strategis untuk jalur perdagangan. Negara ini tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan menjadi bahkan air termasuk sumber daya alam yang langka (Brillianty, 2023). Namun, Singapura berhasil mentransformasikan dirinya menjadi salah satu pusat keuangan dan perdagangan paling dinamis di dunia. Pertumbuhan perekonomian di Singapura dipengaruhi oleh hadirnya investasi asing (Gandhi et al., 2022). Dahulu singapura dikenal dengan pendidikan dan kesehatan yang buruk, namun saat ini dikenal dengan negara yang memiliki kualitas sistem pendidikan dan kesehatan yang baik di dunia (Haq & Sholeh, 2023). Singapura menganut sistem semi otoriter, karena kepemimpinan Lee Kuan Yew dan Lee Hsien Loong yang sangat membatasi kebebasan rakyat.

Sebaliknya, Myanmar diberkahi dengan populasi yang besar, lebih dari 50 juta jiwa, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah termasuk kayu keras, batu mulia, emas, serta lahan pertanian yang subur namun negara ini justru terjerumus dalam kemiskinan yang tinggi, ketidakstabilan politik kronis, dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan (Adjinegoro et al., 2023). Fakta ini menegaskan bahwa kekayaan alam bukanlah penentu utama kemakmuran. Keberhasilan suatu bangsa lebih bergantung pada sistem politik yang stabil, tata kelola pemerintahan yang baik, dan investasi serius pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Secara formal, Myanmar menganut sistem Presidensial dengan legislatif bikameral berdasarkan Konstitusi 2008. Namun, kenyataannya, sejak kemerdekaannya pada tahun 1948, negara ini didominasi oleh pemerintahan militer yang sangat otoriter (dikenal sebagai Junta Militer atau Tatmadaw) (Sinaga, 2013). Meskipun sempat mengalami periode transisi menuju demokrasi pada tahun 2010-an, militer tetap memegang kendali politik yang signifikan. Sejak kudeta 2021 dan berlanjutnya perang sipil, ekonomi Myanmar semakin hancur, harga kebutuhan pokok meroket, dan aktivitas ekonomi ilegal seperti produksi narkoba (opium dan metamfetamin) meningkat pesat karena ambruknya sistem kredit pedesaan karena ambruknya sistem kredit pedesaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan menganalisis dan fokus membahas mengapa kedua negara dengan karakteristik sistem politik yang sama-sama otoritarian dapat mencapai hasil ekonomi yang kontras. Pertanyaan ini memiliki implikasi praktis yang mendalam bagi pemahaman kita sebagai governance institusi dan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Dalam menganalisis paradoks ini penulis akan menggunakan Teori Institusi Douglass North. Teori ini digunakan karena sangat relevan antara kerangka analisis yang ditawarkan dan pemahaman paradoks. Teori Institusi digunakan secara sistematis untuk menjelaskan varian hasil ekonomi yang ekstrem di

bawah kerangka politik yang serupa, memberikan argumen yang kuat dan terstruktur. Perbandingan ini diharapkan dapat mengungkapkan bahwa sistem otoritarian bukan yang menentukan kesuksesan atau kegagalan ekonomi, melainkan bagaimana kekuasaan digunakan di institusi baik formal ataupun informal dalam pembangunan jangka panjang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Institusi Douglass North

TDouglass C. North, ekonom Amerika yang meraih Nobel Ekonomi pada tahun 1993, mengembangkan teori institusi yang telah menjadi landasan fundamental dalam memahami perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara. North (1990) mendefinisikan institusi sebagai "aturan main dalam masyarakat" atau lebih formal sebagai "batasan yang diciptakan manusia yang membentuk interaksi politik, ekonomi, dan sosial" (Azzahra et al., 2025). Institusi dalam pandangan North bukanlah organisasi atau lembaga fisik seperti bank atau parlemen, melainkan sistem aturan, norma, dan mekanisme penegakan yang mengatur bagaimana individu dan organisasi berinteraksi dalam masyarakat. Defsinisi ini menjadikan institusi sebagai kerangka kerja yang menentukan struktur insentif dalam perekonomian, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan investasi, inovasi, dan akumulasi modal.

North membagi institusi ke dalam dua kategori besar yang saling berinteraksi. Pertama adalah institusi formal, yang mencakup konstitusi, undang-undang, hak kepemilikan, kontrak, dan regulasi pemerintah yang tertulis dan dapat dikodifikasikan. Institusi formal ini biasanya dibuat secara sengaja oleh otoritas politik dan memiliki mekanisme penegakan yang jelas melalui sistem peradilan dan aparat negara. Kedua adalah institusi informal, yang terdiri dari norma sosial, tradisi, kode etik, konvensi budaya, dan nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat. Institusi informal ini berkembang secara evolusioner dalam masyarakat dan sering kali lebih tahan lama dibandingkan institusi formal karena sudah terinternalisasi dalam perilaku masyarakat. Menariknya, North menekankan bahwa institusi informal sering kali lebih menentukan dalam praktik ekonomi sehari-hari dibandingkan aturan formal, terutama di negara-negara berkembang di mana kapasitas penegakan hukum formal masih lemah.

LITERATUR REVIEW

Penelitian yang dilakukan (Brillianty, 2023) membandingkan Indonesia dan Singapura dalam aspek politik, ekonomi, teknologi dan pertahanan keamanan. Meskipun Indonesia memiliki wilayah lebih luas dan sumber daya melimpah, Singapura berhasil mencapai kemajuan ekonomi yang lebih pesat. Singapura menerapkan sistem parlementer dengan politik yang stabil sejak kemerdekaannya 1965. Keberhasilan Singapura dicapai melalui fokus pada pembangunan SDM, penguasaan teknologi, e-governance yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemajuan Singapura diawali dari bidang kesehatan, pendidikan, penguasaan IPTEK bukan melalui eksploitasi kekayaan alam.

Penelitian yang ditulis oleh (Wardah et al., 2025) membahas perbedaan sistem politik demokrasi yang terjadi di Korea Selatan dengan sistem otoriter Korea Utara. Korea Selatan menganut republik demokrasi presidensial dengan sistem multi-partai, pemilihan langsung presiden untuk masa jabatan 5 tahun, dan pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebaliknya, Korea Utara menerapkan sistem otoriter berbentuk monarki absolut di bawah kepemimpinan Partai Buruh Korea dengan prinsip sentralisasi kekuasaan. Sistem otoriter Korea Utara berdampak pada pembatasan kebebasan berekspresi, kontrol ketat pemerintah terhadap kehidupan warga, dan krisis ekonomi berkepanjangan. Penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan mendasar terletak pada sistem pemerintahan, kepala negara, partai politik, dan asas pembentukan sistem politik, dengan Korea Utara berbasis ideologi komunis totalitarian.

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Nurdin, 2023). Penelitian ini mengkomparasikan antara kebijakan kesejahteraan sosial Inggris sebagai negara demokrasi liberal

dengan Singapura sebagai negara otoritarian. Inggris menerapkan sistem welfare state sejak 1945 di bawah pemerintahan Partai Buruh dengan fokus pada pelayanan kesehatan nasional (NHS), asuransi nasional, pendidikan gratis, dan perlindungan buruh. Singapura menerapkan soft-authoritarianism dengan kebijakan kesejahteraan berbasis empat pilar: perumahan, perawatan kesehatan, pensiun, dan dukungan pekerja lanjut usia. Penelitian menemukan bahwa kedua negara sama-sama menganut welfare capitalism sebagai respons terhadap dampak negatif kapitalisme. Perbedaan utama terletak pada pendekatan: Inggris menggunakan pendekatan sistem/strukturalis melalui legislasi, sedangkan Singapura menggunakan pendekatan institusional dengan peran sentral pemerintah. Ideologi keduanya juga berbeda Inggris mendasarkan pada liberalisme dengan peran warga negara yang kuat, sementara Singapura mendasarkan pada Konfusianisme dengan peran negara yang dominan dan kepatuhan warga negara.

Penelitian "Paradoks Kemakmuran: Perbandingan Sistem Otoritarisme Negara Singapura dan Myanmar" memiliki beberapa persamaan fundamental dan juga perbedaan dengan ketiga jurnal yang telah dikaji. Persamaan dari ketiga jurnal yang pertama adalah seluruh penelitian menggunakan studi komparatif untuk menganalisis sistem politik pemerintahan suatu negara. Kedua semua penelitian memberikan perhatian khusus kepada sistem pemerintahan otoriter terutama Singapura yang menjadi case utama di setiap penelitian. Fokus pada otoritarianisme ini sejalan dengan penelitian tentang Myanmar dan Singapura yang sama-sama menerapkan sistem otoritarian namun dengan hasil pembangunan yang kontras. Ketiga penelitian terdahulu menunjukkan bahwa otoritarianisme bukanlah sistem yang monolitik, melainkan memiliki berbagai varian dan hasil yang berbeda-beda tergantung pada bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan.

Persamaan ketiga, semua penelitian menggunakan pendekatan multidimensional dalam menganalisis keberhasilan atau kegagalan suatu negara. Pendekatan komprehensif ini relevan dengan penelitian tentang Singapura dan Myanmar yang juga memerlukan analisis melintasi berbagai dimensi seperti kualitas institusi, visi kepemimpinan, kebijakan ekonomi, kapasitas birokrasi, dan konteks historis-geografis untuk memahami paradoks kemakmuran yang terjadi. Persamaan keempat adalah ketiga jurnal menekankan pentingnya faktor institusi, kebijakan publik dan kapasitas birokrasi dalam menentukan kesuksesan pembangunan nasional. Kelima, semua penelitian memberikan konteks regional Asia yang kuat, dengan fokus pada negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. (Brillianty, 2023; Nurdin, 2023) secara langsung menganalisis Singapura dalam konteks ASEAN, sementara (Wardah et al., 2025) mengkaji semenanjung Korea sebagai bagian dari dinamika Asia Timur. Konteks regional ini penting karena menunjukkan bahwa negara-negara Asia memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang spesifik, termasuk warisan kolonial, nilai-nilai budaya seperti konfusianisme, dan pengalaman modernisasi yang berbeda dari negara-negara Barat. Penelitian tentang Myanmar dan Singapura juga harus mempertimbangkan konteks ASEAN dan dinamika regional Asia Tenggara untuk memahami secara komprehensif paradoks kemakmuran yang terjadi.

Meskipun memiliki berbagai persamaan, penelitian "Paradoks Kemakmuran: Perbandingan Sistem Otoritarisme Negara Singapura dan Myanmar" memiliki perbedaan mendasar dengan ketiga jurnal yang dikaji. Perbedaan paling fundamental terletak pada objek perbandingan yang dipilih. Ketiga jurnal terdahulu membandingkan negara-negara dengan sistem politik yang berbeda, (Brillianty, 2023) membandingkan Indonesia yang demokratis dengan Singapura yang otoritarian, (Wardah et al., 2025) mengkaji Korea Selatan demokratis versus Korea Utara otoriter, dan (Nurdin, 2023) menganalisis Inggris yang demokrasi liberal dengan Singapura yang soft-authoritarian. Sebaliknya, penelitian tentang Singapura dan Myanmar membandingkan dua negara yang sama-sama menerapkan sistem otoritarian namun menghasilkan outcome pembangunan ekonomi yang sangat berbeda. Pemilihan objek perbandingan ini memiliki implikasi metodologis dan teoretis yang signifikan, karena dengan mengisolasi variabel sistem politik (sama-sama otoriter), penelitian dapat lebih fokus

mengidentifikasi faktor-faktor lain yang sesungguhnya menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan ekonomi.

Perbedaan kedua terletak pada fokus paradoks yang dianalisis. Ketiga jurnal terdahulu pada dasarnya mengeksplorasi pertanyaan klasik dalam ilmu politik: apakah demokrasi atau otoritarianisme lebih efektif dalam membawa kesejahteraan bagi warga negara? (Brillianty, 2023) menunjukkan bahwa Singapura yang otoritarian lebih berhasil dibanding Indonesia yang demokratis; (Wardah et al., 2025) membuktikan Korea Selatan demokratis jauh lebih makmur dari Korea Utara otoriter; sementara (Nurdin, 2023) menemukan bahwa baik Inggris demokratis maupun Singapura otoritarian sama-sama dapat mencapai kesejahteraan melalui pendekatan berbeda. Sebaliknya, penelitian Singapura-Myanmar menganalisis paradoks yang berbeda: mengapa dua negara dengan sistem politik yang sama (otoritarianisme) dapat menghasilkan trajektori pembangunan yang dramatis berbeda? Paradoks ini lebih kompleks karena menantang asumsi bahwa sistem politik adalah determinan utama kesuksesan ekonomi, dan membuka ruang untuk menganalisis variabel-variabel lain seperti kualitas kepemimpinan, visi strategis, kapasitas institusional, dan kebijakan ekonomi.

Perbedaan ketiga berkaitan dengan dimensi sumber daya alam yang menjadi salah satu elemen kunci dalam paradoks kemakmuran. Penelitian Singapura-Myanmar secara eksplisit menekankan ironi bahwa Myanmar dengan sumber daya alam yang melimpah—termasuk gas alam, minyak, kayu jati, batu mulia, dan lahan pertanian subur—justru tetap terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Sebaliknya, Singapura yang praktis tidak memiliki sumber daya alam, bahkan harus mengimpor air dari Malaysia, berhasil menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita yang melampaui negara-negara maju Eropa. (Brillianty, 2023) memang menyinggung bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam lebih banyak dari Singapura namun kurang mampu memanfaatkannya, tetapi tidak menjadikan paradoks sumber daya alam ini sebagai fokus utama analisis. Sementara (Nurdin, 2023; Wardah et al., 2025) sama sekali tidak membahas dimensi sumber daya alam dalam perbandingan mereka. Paradoks sumber daya alam ini penting karena membantah teori pembangunan klasik yang menganggap kepemilikan sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan ekonomi, dan justru menguatkan argumen bahwa modal manusia, institusi, dan kebijakan adalah faktor yang lebih menentukan.

Perbedaan keempat berkaitan dengan spektrum outcome kesejahteraan yang dianalisis. Ketiga jurnal terdahulu cenderung membandingkan negara-negara yang setidaknya satu diantaranya relatif berhasil mencapai kesejahteraan Singapura, Korea Selatan, Inggris, bahkan Indonesia yang meskipun masih berkembang namun mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Hanya Korea Utara dalam penelitian (Wardah et al., 2025) yang mewakili kasus kegagalan ekstrem. Penelitian Singapura-Myanmar menganalisis spektrum penuh dari keberhasilan ekstrem (Singapura sebagai salah satu negara terkaya dunia dengan HDI sangat tinggi) hingga kegagalan ekstrem (Myanmar sebagai salah satu negara termiskin di Asia dengan krisis ekonomi dan kemanusiaan berkepanjangan). Kontras yang tajam ini memberikan kekuatan analitis lebih besar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan keberhasilan dari kegagalan, karena perbedaannya sangat jelas dan signifikan secara statistik.

Perbedaan kelima terletak pada implikasi teoretis yang dihasilkan. Ketiga jurnal terdahulu pada dasarnya mengkonfirmasi atau menolak teori hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. (Brillianty, 2023; Wardah et al., 2025) menunjukkan bahwa hasil pembangunan bervariasi tergantung banyak faktor selain sistem politik; (Nurdin, 2023) menemukan bahwa baik demokrasi maupun otoritarianisme dapat mencapai kesejahteraan melalui pendekatan berbeda. Namun penelitian Singapura-Myanmar memiliki implikasi teoretis yang lebih radikal: menantang determinisme sistem politik dengan membuktikan bahwa otoritarianisme per se bukan faktor penentu kesuksesan atau kegagalan ekonomi. Dengan membandingkan dua negara otoriter dengan hasil yang sangat berbeda, penelitian ini menggeser fokus analisis dari tipe rezim (demokrasi vs otoritarianisme) ke kualitas governance, yaitu bagaimana kekuasaan diorganisir, untuk tujuan apa kekuasaan digunakan, bagaimana institusi dibangun, dan

seberapa efektif kebijakan diimplementasikan. Ini membuka perspektif baru dalam studi pembangunan politik-ekonomi bahwa yang penting bukan label sistem politik, melainkan substansi dan kualitas dari tata kelola pemerintahan.

Perbedaan keenam adalah relevansi kebijakan dan pembelajaran praktis bagi negara-negara berkembang. Ketiga jurnal terdahulu memberikan pelajaran yang relatif normatif demokrasi dapat membawa kesejahteraan (kasus Korea Selatan dan Inggris), otoritarianisme juga bisa berhasil dalam konteks tertentu (kasus Singapura), dan otoritarianisme tanpa governance yang baik akan gagal (kasus Korea Utara). Penelitian Singapura-Myanmar memberikan pembelajaran yang lebih nuanced dan praktis: negara-negara berkembang tidak harus memilih antara demokrasi atau otoritarianisme untuk mencapai kesejahteraan, melainkan harus fokus pada pembangunan institusi berkualitas, pemberantasan korupsi, investasi SDM, keterbukaan ekonomi, dan perencanaan pembangunan jangka panjang terlepas dari sistem politik yang dianut. Ini sangat relevan bagi Indonesia yang sedang berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat sambil mempertahankan sistem demokrasi, dengan menunjukkan bahwa kunci keberhasilan bukan pada sistem politiknya melainkan pada kualitas institusi dan kebijakan yang dijalankan.

Pembahasan mengenai perbedaan dan persamaan antara ketiga jurnal dengan penelitian ini menemukan gap research. Literatur terdahulu cenderung berfokus pada perbandingan keberhasilan pembangunan antara sistem politik yang berbeda otoriter vs demokrasi. Hal ini menyisakan kekosongan analisis dalam memahami dinamika internal rezim otoriter itu sendiri. Penelitian “paradoks kemakmuran: perbandingan sistem otoriter Myanmar dan Singapura” berusaha mengisi kekosongan dengan melakukan studi komparasi dua negara yang memiliki sistem yang sama namun hasil keduanya sangat berbeda. Kesenjangan ini memungkinkan peneliti untuk menggeser dari analisis rezim ke analisis kualitas tata kelola, visi kepemimpinan dan kualitas institusi yang mungkin saja berperan besar dalam pembangunan ekonomi atau kemakmuran.

Penelitian ini menjadi penting dan menarik di bahas karena secara teoritis penelitian ini bersifat radikal yang menantang asumsi deterministic bahwa tipe sistem politik adalah penentu kesuksesan ekonomi. Dengan menunjukan kontras ekstrem antara dua rezim otoriter, penelitian ini menggeser wacana pembangunan dari debat demokrasi vs otoriter menjadi isi yang lebih substantif dan operasional bagaimana kekuasaan di organisir dan digunakan. Secara praktis, temuan ini sangat relevan dengan negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena menyajikan pelajaran yang bernuansa kunci untuk kemakmuran.

METODE PENELITIAN

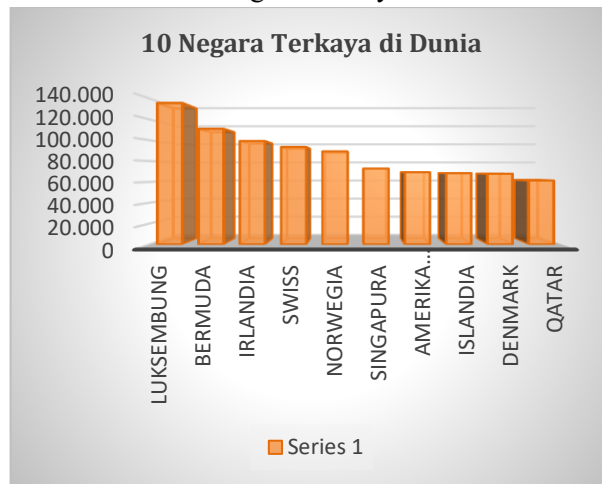
Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang melihat secara utuh case atau fenomena yang sedang diteliti dengan tujuan mengeksplorasi makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis secara mendalam dan melakukan perbandingan lintas kasus yang memiliki kesamaan fundamental dalam sistem namun menunjukkan outcomes yang signifikan. Tujuan utama dalam penelitian ini mengungkapkan mekanisme dan faktor-faktor lain yang melatarbelakangi disparitas hasil. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup jurnal, buku, laporan penelitian, artikel dan publikasi lainnya. Penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur lalu di olah. Proses analisis data dilaksanakan menggunakan coding studi kasus dari (Creswell, 2013). Proses analisis diiringi dengan perbandingan data dari kedua negara melalui persamaan dan juga perbedaan yang ada di kedua negara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus ilmu kontemporer, hubungan antara sistem pemerintahan otoritarian dan pembangunan ekonomi telah menjadi perdebatan klasik yang menarik dan kontroversial. Paradigma klasik sering

mengansumsikan bahwa bahwa prasyarat bagi kemakmuran ekonomi adalah sistem demokrasi, namun realitas yang terjadi di negara asia tenggara jauh lebih kompleks. Dua negara yang berada di kawasan geografis yang sama yaitu Singapura dan Myanmar menawarkan studi kasus yang sangat kontras tentang bagaimana sistem otoritarian dapat menghasilkan hasil pembangunan yang berbeda.

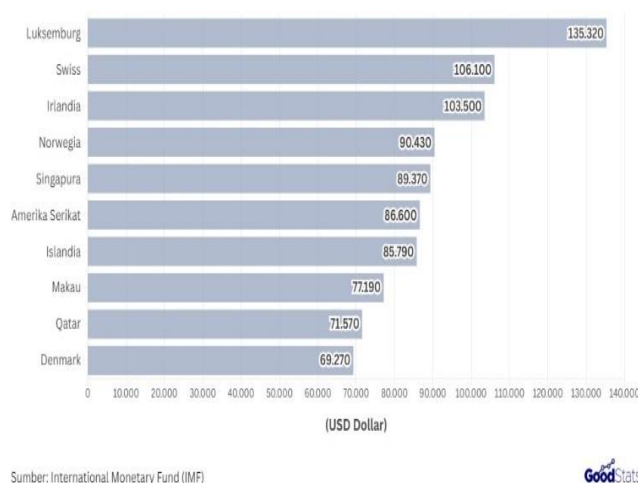
Gambar 1. Negara Terkaya di Dunia



Sumber: (Nurawan & Mahendra, 2023)

Singapura, sejak kemerdekaannya pada tahun 1965 telah bertransformasi dari negara kepulauan kecil yang miskin sumber daya alam menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita yang melampaui banyak negara maju Barat. Singapura menerapkan soft-authoritarianism, menurut (Hairi, 2019) dalam risetnya menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Singapura berbentuk soft-authoritarian yang dikombinasikan dengan mekanisme responsif terhadap arus demokrasi global. Model soft authoritarianism Singapura dibangun dengan logika yang jelas pertama adalah stabilitas politik untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, kedua adalah efisiensi birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan dengan cepat dan efektif, dan ketiga adalah fokus jangka panjang pada transformasi ekonomi struktural. Pendekatan ini memungkinkan Singapura untuk bergerak cepat dalam melakukan reformasi tanpa harus terjebak dalam perdebatan politik yang panjang.

Gambar 2. Negara Terkaya di Dunia berdasarkan PDB per Kapital 2024



Sumber: (Sugiyatri, 2025)

Singapura terus melejit bagaikan meteor di kancah global. Negara pulau terkecil ini membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukanlah penghalang untuk mencapai puncak kemakmuran. Salah satu rahasia dibalik suksesnya fenomena Singapura ini tidak jauh dari sistem soft authoritarianism yang di tetapkan sejak era Lee Kuan Yew. Stabilitas politik yang absolut menarik

investasi global tanpa henti, birokrasi yang super efisien dan perencanaan jangka panjang membuat Singapura berhasil menciptakan lingkungan bisnis yang premium. Negara-negara lain masih terjebak dengan pusaran demokrasi yang lambat dan penuh kompromi sedangkan Singapura bergerak cepat dengan keputusan yang tegas.

Namun kesuksesan ini hadir dengan harga, ada kebebasan berpendapat yang terbatas, kontrol media yang ketat, dan ruang sipil yang menyempit. Singapura membuktikan bahwa kemakmuran ekonomi dapat dicapai tanpa ada demokrasi liberal. Situasi ini sebuah model kontroversial namun tak terbantahkan efektifnya. Singapura dengan GDP perkapita berhasil melampaui banyak negara Barat, dengan menciptakan negara dengan infrastruktur kelas dunia dan kehidupan yang memukau. Konsep soft-authoritarianism yang diterapkan Singapura merujuk pada pemerintah yang tetap mempertahankan kontrol politik yang ketat namun tetap responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan ekonomi masyarakat. Pemerintah sengaja membatasi kebebasan politik agar stabilitas politik terjaga sehingga menciptakan lingkungan yang aman untuk investor asing dalam kurun waktu jangka panjang (Aulia, 2019). Kontrol ketat juga dilakukan pada tingkatan pemerintah sehingga membuat birokrat bekerja efisien transparan dan juga meminimalisir korupsi. Terbukti selama ini Singapura dikenal dengan bersihnya dari korupsi (Aschenbrenner, 2023).

Gambar 3. IPK negara Asean dari yang terbaik hingga terburuk



Sumber: (Naurah, 2023)

Prestasi gemilang Singapura dalam memerangi korupsi tercermin nyata dalam IPK negara Asean Singapura berada di posisi pertama. Negara pulau ini konsisten menduduki peringkat teratas sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia, bahkan kerap menempati posisi nomor 1 bersama Denmark dan Selandia Baru. Dengan skor CPI yang mencapai 83-85 dari skala 100, Singapura melampaui banyak negara maju termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Pencapaian spektakuler ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari penerapan sistem yang keras dan tanpa ampun terhadap praktik korupsi. Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), lembaga anti-korupsi independen Singapura, diberikan kewenangan luar biasa untuk menyelidiki siapa pun tanpa pandang bulu termasuk menteri, pejabat tinggi, hingga keluarga elit politik. Gaji pegawai negeri yang kompetitif, sistem merit yang ketat, hukuman berat bagi pelanggar, dan transparansi dalam pengadaan publik menjadi pilar-pilar yang membuat korupsi hampir mustahil berkembang. Keberhasilan ini membuktikan bahwa dalam sistem soft-authoritarianism Singapura, kontrol politik yang kuat justru menjadi senjata ampuh untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel—sebuah ironi yang membantah asumsi bahwa kekuasaan absolut selalu melahirkan korupsi absolut.

Gambar 4. Tingkat Kemiskinan di Asia Tenggara



Sumber: (Aditya, 2023)

Di sisi lain spektrum, Myanmar menampilkan narasi yang kontras dan menyayat hati. Meskipun sama-sama menerapkan sistem otoriter dengan kontrol politik yang ketat, negara bekas Burma ini justru terperosok dalam jurang kemiskinan yang dalam. Pada tahun 2023, Myanmar harus menanggung beban berat sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara, sebuah pencapaian yang tragis dan ironis. Berbeda dengan Singapura yang menggunakan otoritarianisme sebagai instrumen efisiensi dan pembangunan, Myanmar justru mengubahnya menjadi mesin penindasan yang menghancurkan ekonomi. Kudeta militer yang terjadi pada Februari 2021 semakin memperparah kondisi yang sudah rapuh, memicu konflik internal berkepanjangan, sanksi internasional yang melumpuhkan, dan eksodus massal investasi asing. Junta militer yang berkuasa lebih fokus pada konsolidasi kekuasaan dan penindasan oposisi ketimbang pembangunan ekonomi yang inklusif. Korupsi merajalela di kalangan elite militer, infrastruktur terbengkalai, sistem pendidikan dan kesehatan kolaps, sementara rakyat sipil menjadi korban dari ambisi politik segelintir penguasa. Myanmar membuktikan bahwa otoritarianisme tanpa visi ekonomi yang jelas, tanpa supremasi hukum, dan tanpa komitmen pada kesejahteraan rakyat, hanya akan melahirkan kemiskinan, ketidakstabilan, dan penderitaan massal.

Myanmar menerapkan model yang berbeda yaitu hard authoritarianism yang sangat berbeda dengan Singapura, dimana kekuasaan militer mendominasi seluruh aspek dan kehidupan politik negara. Menurut penelitian (Dewi & Saputra, 2025) di Myanmar militer memiliki peran yang sangat sentral, institusi militer tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan negara tetapi juga aktor politik utama yang mengontrol kekuasaan di Myanmar. Model otoritarianisme ini berorientasi pada pertahanan kekuasaan militer itu sendiri, bukan pada pembangunan ekonomi atau kesejahteraan rakyat.

Berbeda dengan soft-authoritarianism Singapura yang memiliki visi jangka panjang untuk transformasi ekonomi, hard authoritarianism Myanmar dicirikan oleh ketiadaan visi pembangunan yang koheren dan berkelanjutan. (Stokke & Kyaw, 2024) menjelaskan bahwa pasca kudeta militer 2021,

Myanmar mengalami proses "full autocratization" dimana rezim militer semakin menghilangkan ruang-ruang demokratis dan menerapkan represi yang lebih keras terhadap resistensi rakyat. Junta militer menggunakan kekerasan sebagai bahasa politik utama penangkapan massal aktivis pro-demokrasi, penembakan terhadap demonstran damai, pembungkaman media independen, hingga serangan militer terhadap kelompok etnis minoritas menjadi pemandangan sehari-hari yang mengerikan. Hal ini menunjukkan dengan gamblang bahwa sistem otoritarianisme Myanmar bersifat destruktif dan self-serving karena lebih fokus pada penguatan kontrol politik elite militer, pemertahanan privilese ekonomi kalangan jenderal, dan eliminasi ancaman terhadap kekuasaan mereka daripada pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak ada grand strategy untuk industrialisasi, tidak ada roadmap untuk pemberantasan korupsi, tidak ada komitmen untuk menarik investasi asing yang legitimate—yang ada hanyalah siklus kekerasan, isolasi internasional, dan kemunduran ekonomi yang membawa Myanmar kembali ke era kegelapan. Kontras ini memperlihatkan bahwa otoritarianisme bukanlah variabel tunggal yang monolitik; ada spektrum luas antara otoritarianisme yang developmentalist dan transformatif seperti Singapura, versus otoritarianisme yang predatory dan parasitik seperti Myanmar, dimana yang pertama membangun negara sementara yang kedua justru menghancurkannya dari dalam.

Jurnal yang di tulis (Kennedy, 2014) menjelaskan bahwa dalam tingkat militerisasi negara negara ASEAN menunjukkan bahwa Myanmar memiliki tingkat militerisasi yang sangat tinggi, dimana sumber daya negara dialokasikan secara tidak proporsional untuk kepentingan militer. Berbeda dengan Singapura yang menggunakan stabilitas politik untuk menarik investasi asing, Myanmar justru menciptakan ketidakpastian politik yang menakutkan investor internasional. Iklim investasi yang penuh risiko, ancaman penyitaan aset, korupsi yang sistemik, dan kemungkinan konflik bersenjata yang sewaktu-waktu meledak membuat perusahaan multinasional enggan menanamkan modal di Myanmar. Ketidakstabilan di Myanmar juga terlihat dari kudeta yang terus berulang (TINGKAS & DE SILVA, 2024). Siklus kekerasan ini bukan hanya menghancurkan institusi demokrasi yang rapuh, tetapi juga melumpuhkan seluruh ekosistem ekonomi. Sehingga membuat gagalnya pertumbuhan ekonomi Myanmar berada jauh dibawah Singapura walaupun sama-sama otoriter (Sanida & Rahayu, 2022).

Paradoks ini membuktikan dengan telak bahwa label "otoriter" saja tidak cukup untuk menjelaskan nasib ekonomi suatu bangsa; yang krusial adalah apakah otoritarianisme tersebut berorientasi pada pembangunan (developmental state) atau justru berorientasi pada perampokan (predatory state). Myanmar menjadi bukti hidup bahwa otoritarianisme tanpa governance yang baik, tanpa rule of law yang konsisten, tanpa visi ekonomi yang jelas, dan tanpa akuntabilitas minimal, hanya akan melahirkan failed state yang miskin, terisolasi, dan terpuruk dalam lingkaran setan kemiskinan dan konflik.

Ketidakstabilan politik langsung berdampak pada ketidakstabilan ekonomi, tingginya inflasi, dan rendahnya daya beli masyarakat. Sementara Singapura berhasil mengendalikan inflasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, Myanmar terjebak dalam kemiskinan struktural. Bahkan dalam negara Asean Myanmar termasuk negara yang memiliki tingkat disparitas pembangunan yang paling tinggi (Karlina et al., 2024). Kesenjangan ekonomi antara elite militer dan rakyat sipil sangat lebar, dimana kekayaan negara terkonsentrasi pada segelintir petinggi militer dan keluarganya. Berbeda dengan Singapura yang menerapkan sistem meritokrasi dan mendistribusikan hasil pembangunan secara lebih merata, Myanmar menciptakan struktur ekonomi oligarkis yang hanya menguntungkan kalangan militer. Sistem otoriter Myanmar gagal dalam mengintegrasikan berbagai kelompok etnis yang beragam di wilayah, karena terlalu fokus pada cara mempertahankan kekuasaan (Jones, 2014). Rezim di Myanmar tidak hanya merusak negaranya sendiri tetapi negara tetangga mendapatkan dampaknya seperti arus pengungsi, perdagangan narkoba, dan ketegangan geopolitik (Putri, 2021).

Perbandingan antara Singapura dan Myanmar secara jelas menunjukkan bahwa yang menentukan kemakmuran adalah efektivitas tata kelola, bukan kekayaan alam. Sistem soft

authoritarianism Singapura menjamin prasyarat fundamental yang tidak dimiliki Myanmar, yaitu stabilitas politik yang mutlak, yang kemudian diterjemahkan menjadi daya tarik investasi dan birokrasi kelas dunia. Salah satu kekuatan utama dari model otoritarianisme lunak Singapura adalah kemampuannya untuk meminimalkan biaya transaksi politik. Dengan meniadakan perdebatan politik yang berkepanjangan, Pemerintah Singapura mampu mengimplementasikan kebijakan reformasi struktural dengan sangat cepat dan efisien, sebuah keunggulan yang krusial dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Dengan mengedepankan logika stabilitas politik untuk kemajuan ekonomi, Singapura berhasil membuktikan bahwa sebuah negara dapat menjadi pusat keuangan dan perdagangan paling dinamis di dunia hanya dengan mengandalkan kecerdasan kebijakan, SDM berkualitas, dan efisiensi birokrasi, sebuah strategi yang jauh lebih unggul dibandingkan sekadar bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Singapura berhasil menunjukkan kepada negara-negara Asean bahwa dia berhasil konsisten terbaik di semua indikator ekonomi (Lesmana, 2014). Model Singapura menantang pandangan tradisional bahwa demokrasi liberal adalah satu satunya jalan menuju kemakmuran. Sebaliknya, mereka menyajikan narasi alternatif: bahwa otoritarianisme yang responsif, efisien, dan berorientasi pembangunan (*developmental state*) dapat menjadi instrumen yang sangat kuat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kontrol politik yang ketat benar-benar digunakan untuk pembangunan bukan hanya kekuasaan semata (Ruslan, 2023).

Perbandingan antara model *soft authoritarianism* Singapura dan *hard authoritarianism* Myanmar menegaskan kembali gagasan Douglass North bahwa institusi formal dan informal adalah penentu fundamental pertumbuhan ekonomi. Label otoriter saja tidak cukup menjelaskan kenapa terdapat disparitas yang satu kaya dan yang satu miskin. Dalam kasus Singapura, keberhasilan mereka berkat dorongan institusi formal (aturan) terkait anti korupsi, *meritocracy* dan lainnya yang merupakan hasil dukungan institusi informal berupa komitmen para elit untuk memajukan ekonomi pembangunan negara. Institusi informal yang sehat ini memastikan bahwa aturan formal dapat ditegakkan secara adil dan efisien.

Sebaliknya yang terjadi di Myanmar, mereka terjebak di sebuah kondisi dimana institusi dirancang bukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi untuk mempertahankan kekuasaan elit penguasa untuk mengambil sumber daya dan kekayaan dari negara. Rezim militer telah membentuk institusi formal yang buruk yang didominasi oleh patronase, kleptokrasi yang semuanya memprioritaskan kekayaan pribadi dan kekuasaan di atas peningkatan ekonomi rakyat dan kesejahteraan rakyat. Ketidakesesuaian ini membuat institusi informal merusak institusi formal yang menciptakan ketidakpastian politik ekonomi dan pada akhirnya gagal dalam menyalurkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan nasional. Dengan demikian, perbedaan keduanya Singapura sebagai *developmental state* dan Myanmar sebagai *extractive state* adalah jawaban yang tepat untuk menggambarkan kualitas institusi formal yang menjadi penentu apakah rezim yang berjalan dan bagaimana kemakmuran tercipta.

SIMPULAN

Studi komparatif antara Singapura dan Myanmar secara tegas menjawab bahwa kesamaan label sistem politik (otoritarianisme) tidak menjamin kesamaan hasil ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penentu utama di balik disparitas ekstrem dalam kemakmuran kedua negara ini bukanlah tipe rezim politiknya melainkan kualitas dan kongruensi institusi sebagaimana yang telah dihipotesiskan oleh teori institusi Douglass North. Singapura sebagai *development state* berhasil karena institusi informal yang berkomitmen untuk memperkuat institusi formal yang pro terhadap pasar, sehingga mereka bisa maju walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang bisa menjadi jaminan utama mereka dalam memajukan perekonomian, tetapi mereka telah berhasil membangun kepercayaan kepada para investor sehingga menciptakan struktur insentif yang baik yang mendorong investasi produktif dan tumbuh. Sebaliknya Myanmar sebagai *extractive state*, terjebak dalam kondisi dimana institusi informal yang berusaha melumpuhkan institusi formal demi meraih kekuasaan dan kekayaan dari sumber daya

alam yang melimpah. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang mengalihkan fokus pembangunan ke perampasan sumber daya untuk keuntungan elit. Dengan demikian disparitas atau paradoks ini adalah manifestasi sempurna dari bagaimana kualitas aturan tak tertulis yang berlaku, bukan sekedar label politiknya yang menentukan apakah suatu rezim akan menciptakan insentif yang mendorong kemakmuran atau justru menjauhkan dari kemakmuran

REFERENSI

- Addainuri, M. I., Abidin, M., & Suci, L. E. (2023). Analisis Dampak Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asean. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14(2), 155–172. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.400>
- Aditya. (2023). *Tingkat Kemiskinan di Asia Tenggara 2023*. GoodStat.
- Adjinegoro, S., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2023). PENYEBAB KURANG TERWUJUDNYA PENGARUH CONSTRUCTIVE ENGAGEMENT BALI DEMOCRACY FORUM TERHADAP PROSES TRANSISI DEMOKRATIS MYANMAR. *Journal of International Relations Diponegoro*, 9(1), 294–311. <https://doi.org/10.14710/jirud.v9i1.37534>
- Anggraeni, T., Saputra, G., Hasnah, U. N., & Putri, R. N. R. (2023). Ancaman Terhadap Demokrasi: Mengatasi Populisme dan Otoritarianisme. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 248–257. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.28>
- Aschenbrenner, C. (2023). Autocracies and policy accumulation: the case of Singapore. *Public Policy*, 43(4).
- Aulia, Y. (2019). Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura. *Padjadjaran Law Review*, 7(2).
- Azzahra, N. A., Safitri, R. A., & Dewi, H. (2025). Pendidikan Islam Indonesia: Transformasi Lembaga dan Kurikulum. *PANDAI: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 10–17.
- Bachtar, A. (2022). Krisis ekonomi dunia 2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 18(2).
- Brilianty, R. J. (2023). Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura. *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 8(2).
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches (Third Edit)*. SAGE Publications.
- Dewi, E. A. S., & Saputra, A. A. (2025). PERANAN MILITER DALAM KONFLIK INTERNAL MYANMAR PADA TAHUN 2017-2022. *Indonesian Journal of International Relations*, 9(1), 80–96. <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i1.644>
- Gandhi, E. A., Pasaribu, E., Ekaputri, R. A., & Febriani, R. E. (2022). Investasi Asing Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi: Perbandingan Empiris Indonesia dan Singapura. *Ecoplan*, 5(2), 159–170. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.563>
- Hairi, M. I. A. (2019). SISTEM PEMERINTAHAN SOFT-AUTORITHARIAN SINGAPURA DI TENGAH ARUS DEMOKRASI. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v1i2.699>
- Haq, A. M., & Sholeh, M. (2023). Pendidikan di Singapore: Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Sistem Meritokrasi dan Pengembangan Guru. *JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 6(4), 354–364.
- Jones, L. (2014). Explaining Myanmar's regime transition: the periphery is central. *Democratization*, 21(5), 780–802. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.863878>
- Karlina, A., Rikin, Y., Muhtadi, M., & Kurniasih, E. P. (2024). ANALISIS DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR NEGARA ASEAN. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 1939–1950.
- Kennedy, P. S. J. (2014). TINGKAT MILITERISASI NEGARA-NEGARA ASEAN BERDASARKAN NATURAL BALANCE OF POWER MILITARIZATION LEVEL OF ASEAN

- COUNTRIES BASED ON NATURAL BALANCE OF POWER. *Prosiding Seminar Bisnis & Teknologi*, 1(1), 90–113.
- Lesmana, T. (2014). Perkembangan Indikator Ekonomi dan Kemakmuran Indonesia Dibandingkan dengan 6 Negara Tetangga Periode 2005-2012. *Binus Business Review*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i1.1200>
- Marpaung, R., & Siahaan, M. M. (2024). *Dinamika Perilaku dan Budaya Politik dalam Sistem Pemerintahan Global*. Pradina Pustaka.
- Naurah, N. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kian Merosot, Ini Statistiknya*. GoodStat.
- Nurawan, R., & Mahendra, R. (2023). *10 Negara Terkaya di Dunia, Ada Singapura hingga Qatar*. Bisnis.Com.
- Nurdin, N. (2023). Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Demokrasi dan Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura Nurdin Program Studi Ilmu Politik FISIP UPNVJ. *Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)*, 4(2), 140–167.
- Pito, T. A., Efriza, & Fasyah, K. (2022). *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Nuansa Cendekia.
- Putri, A. , et al. (2021). Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar. *Nation State: Journal of International Studies*, 4(1).
- Ruslan. (2023). PERBANDINGAN NEGARA SINGAPURA DENGAN INDONESIA DARI ASPEK KEMAJUAN EKONOMI, PEMERINTAH DAN KEMAKMURAN RAKYAT. *Government Publications Review*, 3(10).
- Sanida, N., & Rahayu, N. P. W. (2022). Pengaruh Inflasi di Negara-negara Asean (Indonesia, Singapura, Laos, Myanmar, dan Kamboja). *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 7(2), 139–150. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v7i2.1791>
- Sinaga, L. C. (2013). IMPLEMENTATION OF DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS PRINCIPLESIN ASEAN: CASE STUDY IN CAMBODIA, LAOS, MYANMAR, AND VIETNAM. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 127–142.
- Stokke, K., & Kyaw, N. N. (2024). Revolutionary resistance against full autocratization. Actors and strategies of resistance after the 2021 military coup in Myanmar. *Political Geography*, 108, 103011. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.103011>
- Sugiyatri, U. (2025). *Internasional 10 Negara Terkaya di Dunia Tahun 2024*. GoodStat.
- TINGKAS, E., & DE SILVA, M. (2024). KEBANGKITAN DAN KEJATUHAN AUNG SAN SUU KYI DI MYANMAR (1988-2021): SATU ANALISIS. *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 46–58. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v5i2.344>
- Tudor, M., & Slater, D. (2021). Nationalism, Authoritarianism, and Democracy: Historical Lessons from South and Southeast Asia. *Perspectives on Politics*, 19(3), 706–722. <https://doi.org/DOI:10.1017/S153759272000078X>
- Wardah, S., Argenti, G., & Marsingga, P. (2025). Perbandingan Sistem Politik Demokrasi dan Otoriter (Studi Kasus Korea Selatan dan Korea Utara) . *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5).